KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
NUSA TENGGARA TIMUR

Laporan Evaluasi Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Fokus Analisis: Perbaikan Infrastruktur Jaringan Internet di Kantor Wilayah

Disusun Oleh: Denny Alfian (No. Urut: 18, Kelompok: 2)

Latar Belakang & Tujuan Evaluasi

Latar Belakang

Implementasi SPBE menuntut infrastruktur TIK yang andal. Kondisi eksisting di Kanwil Kemenkumham NTT menunjukkan kendala serius berupa jaringan lambat, tidak stabil, dan penurunan performa Wi-Fi yang menghambat operasional.

Tujuan Evaluasi

1. Mengidentifikasi akar masalah kendala jaringan internet.
2. Menganalisis kesenjangan (gap) antara kondis ieksisting dengan kebutuhan aplikasi SPBE.
3. Merumuskan rekomendasi teknis & strategis perbaikan infrastruktur.

Ruang Lingkup & Dasar Hukum

Ruang Lingkup

Difokuskan pada infrastruktur jaringan internal Kanwil Kemenkumham NTT meliputi:

- Kapasitas bandwidth dari ISP.
- Sebaranjangkauan Access Point (Wi-Fi)
- Kestabilan akses aplikasi terpusat kementerian.

Dasar Hukum

1. Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE.
2. Permenkum No. 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Kementerian Hukum.
3. Permen PANRB No. 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital.

BAB II: Pelaksanaan Kegiatan

Observasi Lapangan

Meninjau langsung titik pemasangan router, switch, dan access point di setiap ruang kerja Kanwil untuk mendeteksi area blank spot

Pengumpulan Data

Wawancara pengelola TIK internal serta merekam keluhan pegawai terkait frekuensi putusnya koneksi (downtime) dan latency aplikasi.

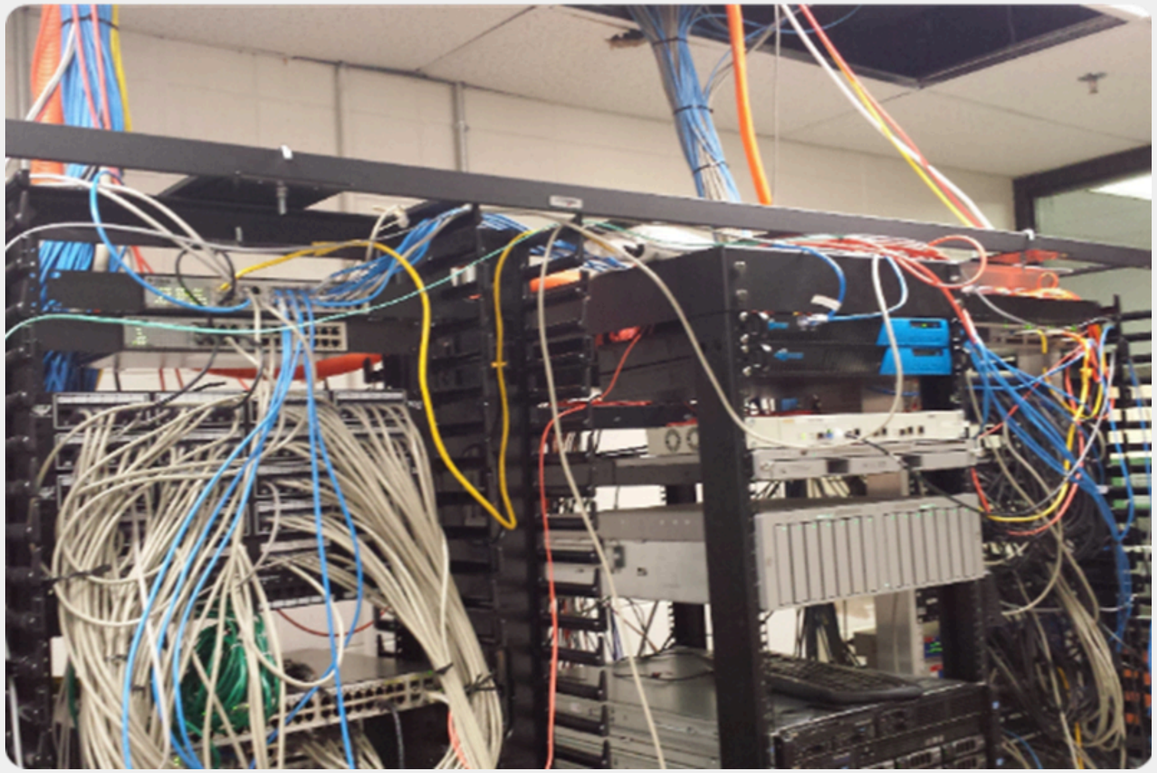
Analisis Kapasitas

Membandingkan spesifikasi bandwidth eksisting dengan volume akses data aktual pegawai pada jam-jam sibuk operasional

BAB II:
Evaluasi Implementasi SPBE

Kondisi Eksisting: Jaringan Wi-Fi sering lambat pada jam padat. Kapasitas bandwidth tidak sebanding dengan perangkat aktif, sebaran sinyal tidak merata, dan perangkat AP sudah usang.

Kondisi Diharapkan: Ketersediaan tinggi (high availability), uptime 99%, dan pembagian jalur data merata agar akses aplikasi kepegawaian & keuanga nbebas timeout.



ANALISIS KESENJANGAN
(Gap Analysis)

Kapasitas vs Beban Trafik

Kebutuhan throughput data meningkat pesat seiring bertambahnya modul layanan digital SPBE, namun pasokan bandwidth dari penyedia layanan (ISP) belum mengalami peningkatan yang proporsional.

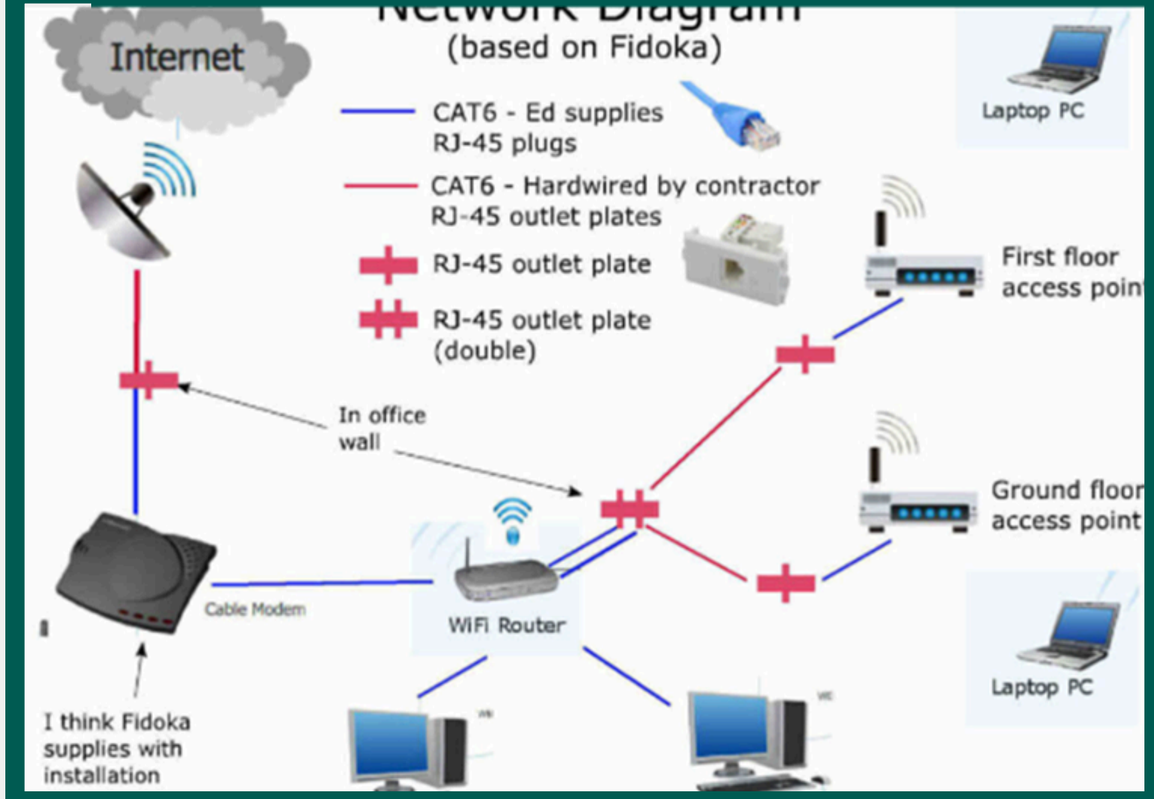
Manajemen Jaringan (QoS)

Belum diterapkannya sistem pembagian bandwidth yang adil (Quality of Service). Akibatnya, lalu lintas data non-kedinasan kerap menguras kuota koneksi utama kantor.

BAB IV: Kesimpulan

Kendala jaringan Wi-Fi yang lambat dan tidak stabil di Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTT merupaka nfaktor penghambat utama (bottleneck) dalam akseleras itransformasi digital.

Betapapun canggihnya aplikasi SPBE pusat, efektivitasnya tidak akan tercapai apabila fondasi konektivitas di satuan kerja daerah masih bermasalah. Perbaikan infrastruktur jaringan mutlak harus diprioritaskan.



BAB V

REKOMENDASI PERBAIKAN JARINGAN

Peningkatan Bandwidth

Melakukan pengajuan upgrade kapasitas langganan internet kepada penyedia layanan (ISP) guna mengakomodasi lonjakan trafik pegawai

Optimalisasi Topologi

Peremajaan perangkat keras (penggantian Access Point lama dengan standar Wi-Fi terbaru) serta penataan ulang letak untuk mengatasi blank spot

Penerapan QoS

Mengonfigurasi router utama untuk memprioritaskan paket data aplikasi kedinasan dan membatasi unduhan hiburan non-esensial jam kerja.

BAB V

Rencana Tindak Lanjut

FASE WAKTU	TARGET KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)
Jangka Pendek (Bulan ke-1)	Melakukan audit menyeluruh (Network Assessment) jalur kabel & router.	Penerapan pembatasan bandwidth sementara & identifikasi titik rusak.
Jangka Menengah (Bulan ke-2 s.d. 3)	Eksekusi penambahan kapasitas internet & pengadaan Access Point baru.	Infrastruktur jaringan stabil dan siap mendukung penuh operasional SPBE.

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
NUSA TENGGARA TIMUR

SEKIAN &
TERIMA KASIH